

Judul : Cegah korban latihan, DPR minta Kemenekraf jamin keselamatan ASN
Tanggal : Rabu, 30 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Cegah Korban Latihan

DPR Minta Kemenekraf Jamin Keselamatan ASN

SENAYAN menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) saat mengikuti Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsamil Komcad). Pemerintah diminta melakukan evaluasi dan penanganan atas peristiwa tersebut secara transparan.

Anggota Komisi VII DPR Putra Nababan mengatakan, insiden ini tidak boleh dipandang sebelah mata dan menjadi momentum evaluasi total bagi Kemenekraf dalam menjamin keselamatan para pegawainya. Karena itu, Kemenekraf untuk segera mengambil langkah proaktif agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya.

"Kejadian ini menjadi alarm sangat serius bagi kami untuk mengevaluasi sekaligus mengawasi secara ketat bagaimana Kemenekraf melindungi keselamatan ASN-nya di lapangan," ujar Putra di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Sebelumnya, seorang ASN di Kemenekraf, Vanreko Varkas Bagaskara, meninggal dunia saat menjadi peserta latsamil Komcad di Lanud Halim Per-

danakusuma, Jakarta pada Sabtu (26/9/2026). Penyebabnya diduga akibat paparan cuaca panas berlebih atau heatstroke karena latihan intensif.

Putra melanjutkan, pengawasan atas peristiwa tersebut akan difokuskan pada tiga poin utama. Pertama, mendesak Kemenekraf mengevaluasi ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan asesmen kesiapan fisik dalam menugaskan ASN ke dalam program militer. Tujuannya agar faktor keselamatan kerja menjadi prioritas mutlak.

Kedua, mendorong adanya koordinasi lintas lembaga yang transparan antara Kemenekraf, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan jajaran TNI untuk membuka secara terang-benderang kronologi kejadian. Bagaimana standar penanganan medis darurat di lapangan, serta memperjelas pembagian tanggung jawab institusional.

Ketiga, negara dan instansi mesti hadir untuk memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan pendampingan psikologis maupun administratif yang layak. Serta, menjamin terpenuhinya seluruh hak-hak almarhum sebagai ASN secara jelas.

Putra mengingatkan, kementerian-



Putra Nababan

an tidak boleh pasif dan tinggal diam. Perlu ada kejelasan mengenai kronologi, standar penanganan, dan pertanggungjawaban medis di lapangan. "Kami (Komisi VII DPR) akan terus mengawal kasus ini agar ada perbaikan sistem yang nyata, sehingga kejadian serupa tidak boleh terulang kembali pada ASN di masa depan," imbuh politisi PDIP ini.

Senada, anggota Komisi I DPR Taufiq R Abdullah meminta Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latsamil Komcad agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Karena itu, proses

investigasi tidak boleh hanya berfokus pada pencarian penyebab kematian peserta semata. Tapi mesti mencakup audit total seluruh tahapan pelatihan.

"Pemerintah perlu mengevaluasi ketat sistem seleksi medis, rasio kecukupan waktu istirahat, intensitas materi fisik, hingga kesiapan tim penanganan darurat di lapangan," ujar Taufiq di Jakarta, Senin (28/9/2026).

Taufiq mengingatkan, pelaksanaan latihan mesti mempertimbangkan kondisi cuaca, kemampuan fisik peserta, kecukupan hidrasi, waktu istirahat, serta kesiapan fasilitas kesehatan. "Jangan sampai standar latihan justru mengabaikan keselamatan peserta," tegas politisi PKB ini.

Sebetulnya, kata dia, program Latsamil Komcad memiliki nilai strategis dalam membangun sistem pertahanan negara. Namun, pencapaian target kesiapsiagaan tersebut mesti berjalan selaras dengan jaminan perlindungan nyawa serta kesehatan fisik dan mental para peserta. Sehingga peserta benar-benar siap secara fisik dan mental. "Jangan hanya melihat seseorang memenuhi syarat secara administratif, tetapi kondisinya juga dipastikan mampu

mengikuti seluruh tahapan latihan," kata dia mengingatkan.

Selain itu, ia meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan penyelenggara Latsamil agar fleksibel menanggapi dinamika cuaca ekstrem di lokasi latihan. Instruktur pelatihan dituntut berani mengambil tindakan penyesuaian, pengurangan beban fisik, hingga penghentian sementara kegiatan demi meminimalisasi risiko fatalitas.

Ia mengingatkan, jangan sampai ada anggapan semakin berat latihan berarti semakin baik hasilnya. Karena ukuran keberhasilan pelatihan bukan seberapa berat beban diberikan. "Tapi bagaimana peserta mencapai tujuan pelatihan dengan tetap selamat dan sehat," ucap legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Komisi I DPR, tegas Taufiq, akan terus mengawal proses investigasi dan penataan ulang Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan Komcad. Perbaikan manajemen risiko pada sistem penyelenggaraan Latsamil Komcad dipandang mutlak demi menjaga kepercayaan publik dan keselamatan ASN yang menjalankan tugas bela negara. ■ TIF